



RIGHTS AND RESOURCES INITIATIVE | JANUARY 2022

---

## *Pertama kali dalam 25 tahun, masyarakat adat dapat bertemu dengan pimpinan perusahaan sawit di Indonesia*

***Setelah menderita bertahun-tahun, suara masyarakat Talang Mamak dalam menentang kekuatan yang merusak hutan mereka akhirnya didengar***

Disusun oleh Nicole Harris, Associate Senior bidang Komunikasi Strategis, RRI

---

Berbicara dengan penuh percaya diri di depan mikrofon sambil memegang *tangkalak* (keranjang upacara adat terbuat dari daun pandan yang dipanen di hutan), Dita, perempuan muda masyarakat adat Talang Parit, mengutarakan kesedihannya atas hilangnya hutan di tanah ulayatnya. *"Jika tidak ada tangkalak, kami tidak dapat mengadakan pernikahan dan upacara adat,"* tegasnya.

Dari tahun ke tahun, semakin sedikit generasi muda masyarakat adat tersebut (yang merupakan salah satu kelompok adat Talang Mamak) yang belajar menenun keranjang tradisional ini karena semakin langkanya daun pandan. Satu per satu hutan di Provinsi Riau dikonversi menjadi perkebunan sawit.

Di hadapan Dita, Batin Adat Talang Parit duduk di atas tikar anyam tradisional yang dibuat dari tanaman rambai setempat. Perlahan Irasan menghapus air matanya tatkala Dita mengenang hilangnya pengetahuan dan sumber daya alam masyarakat mereka selamanya.

### **Menghimpun kekuatan untuk bersuara**

Pada tahun 2020, Irasan dan beberapa anggota masyarakatnya dua kali berangkat ke Jakarta guna menyampaikan pengaduan resmi ke Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Badan

Pertanahan Nasional (BPN) terhadap PT Inecda Plantations lantaran telah melanggar hak ulayat mereka di Provinsi Riau.

RSPO adalah organisasi nirlaba internasional yang melaksanakan standar global minyak sawit berkelanjutan di seluruh industri tersebut. PT Inecda Plantations adalah anak usaha Grup Samsung C&T yang berbasis di Korea melalui S&G Biofuel Pte. Ltd. yang merupakan [anggota bersertifikat RSPO](#). Standar RSPO mencakup pengelolaan perkebunan secara bertanggung jawab, perlindungan sumber daya alam, dan pemenuhan kewajiban terhadap masyarakat setempat.

Kunjungan dan pengaduan tersebut dapat dilakukan berkat dukungan dari [AsM Law Office](#) yang mendorong kebijakan-kebijakan dan praktik yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia, didukung RRI melalui [Mekanisme Respons Strategis](#).

Sebelum berangkat ke Jakarta, AsM Law Office membekali wakil anggota masyarakat dengan pelatihan advokasi dan magang sebagai paralegal, yang tidak hanya membantu mereka menyampaikan surat pengaduan resmi, tetapi juga menyusun dokumen pendapat hukum dan kronologi terperinci tentang pelanggaran lingkungan oleh perusahaan.

*"Kami mengembangkan sebuah metodologi pelatihan yang lebih efektif daripada pelatihan paralegal tradisional agar masyarakat mampu menganalisis dan membangun strategi yang paling efektif untuk kasus yang mereka alami. Tujuan kami bukanlah menjadikan masyarakat adat sarjana hukum dalam seminggu, melainkan menghasilkan paralegal praktek dan siap pakai,"* jelas Andiko, advokat senior AsM Law Office yang membidangi Keberlanjutan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam kasus Talang Parit, sambung Andiko, AsM Law Office melatih angkatan pertama paralegal muda yang aktif terlibat dalam penyampaian pengaduan masyarakat kepada RSPO bersama advokat pro bono profesional yang menyediakan bantuan hukum untuk membela masyarakat.

Pada tahun 2019, RRI melakukan analisis awal rantai investasi terhadap kawasan-kawasan konsesi yang saat ini berada di wilayah adat Talang Mamak guna mendukung penyusunan metodologi Pemantauan Berbasis Masyarakat (*Community-Based Monitoring/CBM*) untuk memantau dampak sosial dan lingkungan dari rantai pasok dan investasi tersebut. Kerangka CBM ini dirancang untuk membantu masyarakat setempat mengawasi dan menuntut akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.

Dengan menggunakan CBM, masyarakat Talang Mamak dapat mendokumentasikan perkembangan perusahaan sawit PT Inecda Plantations beserta dampaknya terhadap wilayah mereka, sekaligus menyampaikan temuan ini kepada RSPO sebagai bagian dari pengaduan resmi mereka.

## Setelah 25 tahun lamanya, suara masyarakat akhirnya didengar...

Pada tanggal 6 hingga 9 Desember 2021, perwakilan RSPO mengunjungi Talang Parit dalam rangka menemui masyarakat di sana untuk pertama kalinya sejak mereka menyampaikan pengaduan pada tahun 2020. Kunjungan ini juga merupakan dialog pertama yang dilakukan antara General Manajer PT Inecda Plantations dan masyarakat.

Pertemuan ini memberi secercah harapan bagi masyarakat dan sumber daya alam di Indragiri Hulu, Riau-Sumatra sejak Pemerintah menerbitkan izin perkebunan bagi PT Inecda Plantations pada tahun 1984, yang mengakibatkan perampasan tanah ulayat Talang Parit seluas 5.760 hektar.

*"Pengaduan resmi yang diajukan kepada RSPO oleh masyarakat adat Talang Mamak di Sumatra membantu meningkatkan tata kelola perkebunan sawit kami. Sebagai anggota RSPO, kami menghormati proses penyelesaian sengketa yang masih berjalan,"* ujar Hamdi, General Manajer PT Inecda Plantations.

Imam A. El Marzuq, Manajer Senior Global Community Outreach and Engagement

RSPO menanggapi dengan menambahkan bahwa ada banyak upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki dampak lingkungan dan sosial-ekonomi sektor sawit di Indonesia. *"Jika perusahaan tidak dapat memenuhi standar keberlanjutan yang tinggi, maka dapat dipastikan pasar sawit Indonesia akan mengalami penurunan,"* terangnya.

Komitmen publik untuk menghormati HAM dan hak atas tanah oleh perusahaan dan investornya yang bersertifikat RSPO – termasuk PT Inecda Plantations dan perusahaan induknya, [Samsung C&T](#), bukanlah hal baru. Meski demikian, bagi Irasan yang sejak tahun 1997 memperjuangkan agar PT Inecda Plantations mengembalikan tanah ulayat Talang Parit, kunjungan perusahaan ini ke masyarakat Talang Parit adalah sebuah langkah menuju penyelesaian konflik.

*"Saya telah berjuang melawan PT Inecda sejak bulan Agustus 1997. Hingga kini, kami di desa hanya menjadi penonton perusahaan perkebunan ini yang merusak wilayah kami. Baru sekarang suara kami akhirnya didengar,"* ujarnya.

**TONTON: Video [kunjungan RSPO ke Masyarakat Talang Mamak di Riau-Indonesia](#)**



### Apa langkah selanjutnya untuk masyarakat Talang Parit?

Dukungan dari AsM Law Office telah membuat masyarakat Talang Mamak mampu melaksanakan pemantauan berbasis masyarakat sekaligus mendokumentasikan secara mandiri dampak pembangunan sawit di tanah ulayat mereka. Setelah menyelenggarakan program magang dan pelatihan pada tahun 2020 dan 2021, AsM Law Office akan terus bekerja sama dengan masyarakat agar mereka semakin cakap dalam melakukan pemantauan, serta mendukung masyarakat Talang Parit dengan cara mengawal proses penyelesaian sengketa terkait pengaduannya terhadap PT Inecda Plantations kepada RSPO dan BPN.

Selanjutnya, perusahaan (dalam hal ini Samsung C&T) beserta investornya perlu terus ditekan agar mematuhi standar sosial-lingkungan sawit berkelanjutan yang mereka klaim sudah dipenuhi.

*“Kedepan Masyarakat Adat Talang Parit berharap RSPO pro aktif untuk menindaklanjuti keluhan yang telah diajukan. RSPO perlu memiliki standar waktu dan tindakan yang terukur untuk penanganan keluhan masyarakat ini,” ujar **Andiko**. “Selain itu, mestinya Samsung C&T sebagai induk perusahaan PT. Inecda, bisa lebih pro aktif untuk mendorong penyelesaian bilateral, mengenai apa yang dikeluhkan oleh masyarakat.”*